



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020



dinsos nangkis
KOTA BANDUNG

DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG

Jl. Babakan Karet Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari
2021



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Bandung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden



No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung yang sebelumnya berbentuk Dinas Sosial Kota Bandung sebagai Lembaga Teknis Daerah yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung. Struktur organisasi pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung saat ini sebanyak 51 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Struktur dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

berdasarkan Jabatan Struktural



NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1	5	17	-	-	24	6	1	54

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan urusan sosial.

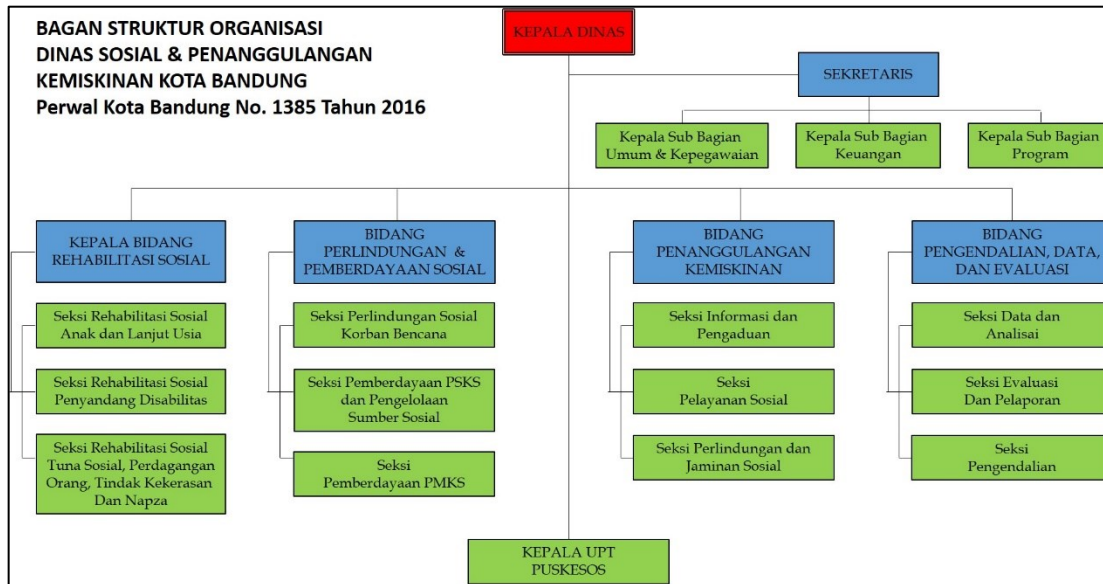
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Dr. TONO RUSDIANTONO H., M.Si. yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung



D. Isu Strategis

Berdasarkan perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Kota Bandung, bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau



penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.



E. Landasan Hukum

LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013 - 2018.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bandung Kota Bandung Tahun 2020 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reuiu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota Bandung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah



ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Bandung yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

Visi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023 adalah :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023 tersebut di atas dilaksanakan Misi sebagai berikut Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

3. Tujuan dan Sasaran



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2019-2023 sebanyak sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PMKS dan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar		52			
		Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar		80			
		Meningkatnya Kualitas	Indeks Kepuasan		85			



		Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	Masyarakat (IKM)					
--	--	---	------------------	--	--	--	--	--

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : Tahun tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2019-2023.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 serta Indikator Sasaran pada Misi 3 RPJMD	Jumlahwarga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dibagi Jumlahwarga tidak mampu yang seharusnya terpenuhi	Fakir Miskin yang telah memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar baik pangan, dan sandangWagra tidak mampu adalah warga



					sebagian kebutuhan dasar dikali 100%	yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota	Jumlah PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar dikali 100%	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial, alat bantu gerak, dan bantuan permakanan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2020, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung



Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	80
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	52
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85

2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau



sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :

Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis

Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan

Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PMKS dan Penduduk Miskin

- Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu
- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung
- Opini WTP dari BPK
- Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar
- Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Persentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup PMKS dan Penduduk Miskin	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%		52			



		Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%		80			
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%		85			

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	Amanat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 serta Indikator Sasaran pada Misi 3 RPJMD	Jumlahwarga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dibagi Jumlahwarga tidak mampu yang seharusnya terpenuhi sebagian kebutuhan dasar dikali 100%		Fakir Miskin yang telah memperoleh pemenuhan sebagian kebutuhan dasar baik pangan, dan sandang Wagra tidak mampu adalah warga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesejahteraan Sosial Tingkat Kota	Jumlah PMKS yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar dibagi jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh rehabilitasi sosial dasar dikali 100%		Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial, alat bantu gerak, dan bantuan permakanan
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	Kinerja pelayanan publik merupakan salahsatu indicator keberhasilan organisasi publik	Mengikuti ketentuan Permenpan No. 14 Tahun 2017		Mengacu pada Permenpan No. 14 Tahun 2017



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan dengan Walikota Bandung dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52
2	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	80



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Red
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Green
> 100%	Melebihi Target	Blue

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Dark Blue
2	Baik	75.00 – 89.99	Green
3	Cukup	65.00 – 74.99	Orange
4	Kurang	50.00 – 64.99	Yellow
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Red



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2020. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2020, hasil revidi dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor :, telah ditetapkan sebanyak 2 sasaran dan sebanyak 2 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor tanggal dan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan



Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	80	93.45	116.81
2	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	100	192.31

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang lebih/melampaui target ditunjukkan pada indikator Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar, dengan capaian kinerja 116.81 %, pada indikator Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar, dengan capaian kinerja 192.31 %.

C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk



mencapai visi dan misi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019-2023 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 3 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Capaian Indikator Kinerja

Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	80	93.45	116.81
2	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	100	192.31
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86.37	101.61

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.4

Pencapaian Kinerja Sasaran

Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.00 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %



Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian target Misi

No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	3	3	100.00	0	0.00	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 3 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	3	100.00 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna



perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2020 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 3 indikator kinerja dari sebanyak 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.7
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	70	84.61	120.87	80	93.45	116.81



Sasaran Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar" adalah sebesar 93.45 dari target sebesar 80 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 116.81 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar" tahun ini menurun 3.96 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 120.87%

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target kinerja pada Sasaran 1 ini sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 1 TA. 2020

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	10	11
Sasaran 1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			
1	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
1.1	Kegiatan rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti	311.919.000.00	293.467.375.00	94.08
1.2	Kegiatan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti	371.925.000.00	1.800.000.00	0.48
1.3	Kegiatan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas (DID)	2.216.738.092.00	1.075.411.200.00	48.51
1.4	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Korban Perdagangan Orang dan Tindak Kekerasan	0	0	48.51
1.5	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Gelandang dan Pengemis	90.786.000.00	88.173.540.00	97.12
1.6	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	669.230.000.00	667.730.000.00	99.78
1.7	Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di Puskesmas	4.022.597.862.00	3.760.145.025.00	93.48
2	Program perlindungan sosial bencana			
2.1	Kegiatan peningkatan kualitas SDM dan perlengkapan kebencanaan	679.345.200.00	600.245.800.00	88.36
2.2	Kegiatan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1.051.225.590.00	1.050.822.485.00	99.96
3	Program Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial			
3.1	Kegiatan Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	29.036.000.00	23.153.000.00	79.74
3.2	Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial	159.799.000.00	154.742.500.00	96.84



Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

	3.3	Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	42.053.000.00	40.150.000.00	95.47
	3.4	Kegiatan Peningkatan Jenjang Kerja Sama Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	50.635.000.00	48.265.000.00	95.32
Total Per Sasaran			9.695.289.744.00	7.804.105.925.00	80.49

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar" tahun ini adalah sebesar 116.81 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan maka capaian kerjanya mencapai 98.37 %.

Sasaran 2

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.9

Analisis Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	50	78.16	156.32	52	100	192.31

Sasaran Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar" adalah sebesar 100 dari target sebesar 52 yang



direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 192.31 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar" tahun ini meningkat 33.99 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 156.32%.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung terhadap pencapaian target kinerja pada Sasaran 2 sebagai berikut :

Tabel 3.10
Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 2 TA. 2020

Sasaran 2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu				
4	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan				
4.1	Kegiatan peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya (DID)	2.165.494.107.00	1.807.735.460.00	83.48	
4.2	Kegiatan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin	1.682.313.600.00	1.525.800.000.00	90.7	
4.3	Kegiatan Identifikasi dan Verifikasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1.393.208.330.00	1.017.605.040.00	73.04	
4.4	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	85.222.500.00	77.555.000.00	91	
4.5	Kegiatan Pengendalian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	54.285.000.00	51.824.700.00	95.47	
4.6	Kegiatan Revitalisasi dan Pengandaan Perangkat Pengolahan Data (DAK)	0	0	95.47	
5	Program Penanganan Fakir Miskin				
5.1	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin	0	0	0	
5.2	Kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga PMKS (DID)	3.639.284.078.00	2.241.780.387.00	61.6	
Total Per Sasaran		9.019.807.615.00	6.722.300.587.00	74.53	

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar" tahun ini adalah sebesar 192.31 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan maka capaian kerjanya mencapai 166.67 %.



Sasaran 3

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.11

Analisis Pencapaian Sasaran 3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan
Kemiskinan Kota Bandung

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		%	Tahun 2020		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	80	80.77	100.96	85	86.37	101.61

Sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" adalah sebesar 86.37 dari target sebesar 85 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 101.61 %, capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini meningkat 0.65 Point dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 100.96

Adapun program dan kegiatan yang menunjang pencapaian target pada Sasaran 3 sebagai berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Program dan Kegiatan Sasaran 3 TA. 2020

Sasaran 3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung				
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
6.1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	992.913.600.00	830.510.306.00	83.64	
6.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.132.996.750.00	819.614.001.00	72.34	
6.3	Penyediaan alat tulis kantor	127.391.330.00	110.392.425.00	86.66	
6.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	200.910.000.00	187.851.000.00	93.5	
6.5	Penyediaan peralatan rumah tangga	87.553.400.00	71.585.677.00	81.76	



Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

	6.6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.020.800.00	23.020.800.00	100
	6.7	Penyediaan makanan dan minuman	166.854.600.00	166.331.320.00	99.69
	6.8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	280.000.000.00	266.821.300.00	95.29
	6.9	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan poengemudi kendaraan dinas operasional kantor	1.898.457.376.00	1.835.876.000.00	96.7
	6.1	Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan poengemudi kendaraan dinas operasional kantor	4.686.897.600.00	4.639.795.600.00	99
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasaran Aparatur				
	7.1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	535.899.890.00	513.457.850.00	95.81
	7.2	Persiapan dan penetapan ISO 9001-2005 Manajemen Mutu	0	0	95.81
	7.3	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	143.634.920.00	103.593.000.00	72.12
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				
	8.1	Pembinaan kinerja aparatur	0	0	0
Total Per Sasaran			10.276.530.266.00	9.568.849.279.00	93.11

Tahun 2020 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)" tahun ini adalah sebesar 101.61 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan maka capaian kerjanya mencapai 101.61 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2019. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120.87 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 156.32 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.96 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 28.991.627.625,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 24.095.255.791,00



dengan demikian dapat dikatakan tahun 2020 Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 4.896.371.834,00.

Renstra Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung 2019-2023 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2020, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 120.87 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 156.32 %
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.96 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 24.095.255.791,00 (dua puluh empat milyar Sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah 83.11% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung.

Tabel 4.1
Efisiensi anggaran terhadap pencapaian kinerja Sasaran IKU Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					
				Target	Realisasi	(%)	Program	Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.1	Prosentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	%	80	93.45	116.81	1	Program Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	7.683.195.954	5.886.727.140	76.62
								2	Program perlindungan sosial bencana	1.730.570.790	1.651.068.285	95.41
								3	Program Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial	281.523.000	266.310.500	94.6
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			116.81	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 36.32 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 145.12 %												
2	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Hak Dasar Warga Tidak Mampu	2.1	Persentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasar	%	52	100	192.31	4	Program Pelayanan Terpadu Kemiskinan	5.380.523.537	4.480.520.200	83.27
								5	Program Penanganan Fakir Miskin	3.639.284.078	2.241.780.387	61.6
								RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			192.31	TOTAL PER SASARAN
TINGKAT EFISIENSI 117.78 %												



Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan

TINGKAT EFEKTIFITAS 258.04 %												
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung	3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	85	86.37	101.61	6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.596.995.456	8.951.798.429	93.28
								7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	679.534.810	617.050.850	90.8
								8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
									RATA-RATA CAPAIAN DARI 1 INDIKATOR			
							101.61		TOTAL PER SASARAN	10.276.530.266	9.568.849.279	93.1
TINGKAT EFISIENSI 8.50 %												
TINGKAT EFEKTIFITAS 109.12 %												
									TOTAL KESELURUHAN	28.991.627.625	24.095.255.791	83.11

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung.

Bandung, 25 Januari 2021

Dr. TONG RUSDIANTONO H., M.Si.

196511181986031005